



PERHIMPUNAN PELAJAR
INDONESIA DI JERMAN
INDONESIAN STUDENTS
ASSOCIATION IN GERMANY
VEREINIGUNG INDONESISCHER
STUDENTEN IN DEUTSCHLAND e.V.
REGISTERGERICHT:
AMTSGERICHT BONN
REGISTERJAHR: 1963
REGISTERNUMMER: VR2912

PERNYATAAN SIKAP

“Pengembangan Ruang IKN Nusantara dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045”

NOMOR: 307/VII/RISDIK/PTN-PPIJ/202223/08062023

TANGGAL: 8 Juni 2023

Setelah menimbang dan mencermati alur proses pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan relevansi serta perannya dalam menyongsong program “Indonesia Emas 2045”, PPI Jerman menyatakan sikap mengenai substansi-substansi pembahasan sebagai berikut.

Substansi pertama: penyusunan dan upaya perwujudan visi “Indonesia Emas 2045”.

1. Mendukung narasi generasi “Indonesia Emas 2045” dan peran IKN Nusantara yang sentral dalam perwujudan narasi tersebut.
2. Mendukung promosi dan perwujudan kegiatan-kegiatan ekonomi dan kewirausahaan sosial yang berbasis teknologi hijau dan budaya.
3. Mendorong kebijakan hilirisasi industri di berbagai sektor primer untuk menaikkan nilai produk dan menjaga stabilitas ekonomi melalui pengurangan ketergantungan pada pasar internasional.
4. Mendukung implementasi teknologi seperti *blockchain* dalam upaya mendemokratisasi data, yang digunakan untuk membantu *streamlining* di berbagai industri setempat, seperti *supply chain* dalam pembangunan, pendataan material, dan lain-lain, serta juga penggunaan

teknologi serupa dalam pendataan birokrasi sebagai upaya meminimalisir kecurangan atau korupsi.

Substansi kedua: penyusunan tata ruang IKN Nusantara.

5. Mendukung ide penumbuhan sentralitas dan titik pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa.
6. Menghimbau peninjauan potensi reaktivasi Selat Makassar sebagai salah satu motor penggerak ekonomi dan logistik internasional.
7. Mendorong integrasi peran IKN Nusantara untuk aktivitas kegiatan ekonomi berbasis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan di pulau Kalimantan.
8. Menyayangkan ketidakserasian beberapa fitur kota, seperti contohnya rencana pembuatan boulevard enam jalur, dengan konsep awal IKN Nusantara sebagai "*10-minute city*" yang mengedepankan aktivitas kota tanpa kendaraan pribadi.
9. Mendorong pemikiran dan perencanaan lebih matang untuk mengatasi *urban sprawl* yang berpotensi tumbuh tidak terkontrol di luar wilayah IKN Nusantara, dengan belajar dari Jakarta.
10. Mendukung pengembangan industri-industri inovatif di IKN Nusantara dengan konsep *clusters* yang memberi insentif dan mengintegrasikan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor serupa, dengan sokongan universitas-universitas setempat, seperti di Balikpapan dan Samarinda.
11. Mendorong pengembangan bandara internasional, dengan desain kelas dunia dan beroperasi dengan energi dari sumber terbarukan, di sekitar IKN Nusantara sebagai syarat mutlak perwujudan IKN Nusantara sebagai *global city*, yang bisa berperan dalam meningkatkan mobilitas kegiatan inovasi di IKN Nusantara dan juga mendorong konektivitas internasional daerah-daerah Indonesia bagian timur.

Substansi ketiga: representasi masyarakat dalam pembangunan IKN Nusantara.

12. Mendorong didirikannya lembaga representasi yang memiliki fungsi *pengawasan* dan terdiri dari anggota kelompok-kelompok masyarakat di Kalimantan Timur secara khusus dan Kalimantan secara umum untuk mendukung pengembangan inklusif IKN Nusantara.
13. Mendorong dibuatnya mekanisme evaluasi yang terbuka dan responsif dengan memanfaatkan media advokasi komunikasi *digital*, sehingga setiap individu masyarakat Kalimantan Timur dari berbagai kelompok dapat beraspirasi dan membantu proses pemajuan IKN Nusantara. Hal ini juga selaras dengan konsep *smart city* yang hendak dikembangkan di IKN Nusantara, yang

mengedepankan partisipasi aktif langsung warga kota dalam memberi masukan kepada pemerintahan kota.

Substansi keempat: aspek lingkungan dalam pengembangan dan penataan IKN Nusantara.

14. Menuntut pengawasan ketat dan berkelanjutan terhadap implementasi rencana target Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 70% serta penanaman vegetasi-vegetasi asli Kalimantan Timur dengan tidak terbatas pada wilayah IKN Nusantara, melainkan mencakup Kalimantan, dan secara khusus Kalimantan Timur.
15. Menyayangkan *greenwashing* yang dianggap sebagai solusi peralihan dari industri dengan sumber energi tidak terbarukan seperti industri batubara. *Greenwashing* yang dimaksud adalah seperti pengemasan anggapan bahwa gasifikasi batubara, hilirisasi industri batubara, dan program batubara merupakan upaya transisi ke *green energy*. Hilirisasi tidak bisa disamakan dengan transisi ke *green energy*.
16. Memprioritaskan pengembangan *cluster-cluster* ekonomi dan industri yang berbasis energi berkelanjutan, ekoturisme, dan agrikultur berkelanjutan untuk memulai transisi meninggalkan ketergantungan pada batubara dan migas.
17. Mendorong peralihan masif dan cepat penghasilan energi dari sumber-sumber tidak terbarukan (seperti batu bara dan migas) menjadi terbarukan (seperti tenaga surya, *hydroelectric*, gelombang laut, dan lain-lain). Realisasi rencana pembuatan ladang energi berbasis tenaga surya (*photovoltaic solar energy*) di bagian utara IKN Nusantara harus dikawal dengan ketat dan melibatkan lembaga riset terkait, seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selain itu, pengembangan pembangkit listrik tenaga gelombang laut bisa dijadikan salah satu *cluster* ekonomi inovatif yang baru.
18. Mendorong upaya dan pengawasan ketat terhadap berjalannya restorasi mangrove, rehabilitasi lubang tambang secara tuntas, dan persemaian skala besar tanaman-tanaman endemik Kalimantan Timur.
19. Mendukung keberadaan taman-taman nasional serta wilayah hutan yang dilindungi lainnya dan menuntut *restorasi* wilayah-wilayah adat khusus dalam upaya menopang dan mewujudkan *cluster* ekonomi ekoturisme berbasis budaya.

Substansi kelima: pengelolaan desa dan hubungan antara IKN Nusantara dan desa-desa di sekitar.

20. Mendukung upaya memahami pentingnya peran administrasi desa-desa di sekitar IKN Nusantara dalam setiap langkah pembangunan IKN Nusantara.
21. Mendukung perwujudan pertautan ekonomi yang adil dan saling menguntungkan (pengembangan wilayah administrasi masing-masing) antara IKN Nusantara dan desa-desa di sekitar dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memobilisasi kapital dan sumber daya yang ada. Dalam pengembangan ekonomi desa melalui BUMDes, diharapkan model koperasi dapat diterapkan dengan prinsip ekonomi kolektivisme.
22. Mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di desa-desa dengan program akselerasi pendidikan dan ekonomi kreatif melalui pelatihan digital dan modern.

Substansi keenam: pengelolaan dan pelestarian budaya lokal di wilayah IKN Nusantara dan sekitarnya.

23. Mendorong upaya untuk merestorasi dan melestarikan budaya-budaya masyarakat adat Kalimantan Timur secara keilmuan dan dengan memanfaatkan teknologi *digital* termutakhir, seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam merekam budaya yang terancam hilang, dan mengumpulkan data-data serta informasi budaya-budaya tersebut seperti bahasa, seni, dan lain-lain.
24. Mendukung penetapan bahasa dan budaya tradisional sebagai sumber kekuatan dan keunikan dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata, yang pengelolaannya bisa disalurkan melalui UMKM lokal, seiring dengan penetapan identitas budaya IKN yang tidak berkonflik dengan budaya tradisional yang sudah ada.

Demikian pernyataan sikap dari PPI Jerman. Atas perhatian Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Forum PPIJ 2022/23



Fani Mutia Cahyani



Ketua PPI Jerman 2022/23



Dimas Fakhri Arsaputra

Penyusun Pernyataan Sikap



Geraldus Martimbang



Chaska Reyhan Oscario

Kepala Departemen Riset, Pendidikan dan Kajian Strategis - PPI Jerman 2022/23



Winda Kurnia Perangin-Angin

Ikut menyusun dan menyetujui:

- PPI Aachen
- PPI Anhalt
- PPI Berlin-Brandenburg
- PPI Bochum-Dortmund
- PPI Bonn
- PPI Braunschweig

- PPI Bremen
- PPI Duisburg-Essen
- PPI Frada
- PPI Franken
- PPI Giessen
- PPI Göttingen
- PPI Greifswald
- PPI Halle
- PPI Hamburg
- PPI Hannover
- PPI Kaiserslautern
- PPI Karlsruhe
- PPI Kassel
- PPI Kiel
- PPI Leipzig
- PPI München
- PPI Münster
- PPI Saarland
- PPI Stuttgart
- PPI Thüringen